



► MASALAH LINGKUNGAN

Timbulan Sampah Perdesaan Capai 105 Ton/Hari

KULONPROGO—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo mendorong agar setiap kalurahan memiliki minimal satu bank sampah. Kebijakan ini didasari makin banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan, Pertamanan DLH Kulonprogo, Ade Wahyudianto, memaparkan masalah sampah merupakan persoalan strategis dalam setiap aktivitas pembangunan. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tantangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan terutama di tingkat daerah.

Dengan jumlah penduduk Kulonprogo di 2024 yang mencapai 444.516 jiwa, timbulan sampah rata-rata mencapai 0,488 kilogram per orang per hari. "Timbulan sampah terbesar bersumber dari sampah rumah tangga perdesaan sebesar 105,32 ton per hari, dan sumber sampah rumah tangga perkotaan sebesar 31,76 ton per hari," katanya, Rabu (28/5).

Kondisi tersebut menjadi beban bagi TPA Banyuroto dalam pengelolaan sampah. Padahal, usia tempat pengelolaan sampah satu-satunya di Kulonprogo itu hanya tinggal tiga tahun.

Untuk itu, harus ada penanganan agar persoalan sampah dapat tertangani sebelum TPA Banyuroto tidak mampu menampung dan mengolah sampah lagi. "Harus ada upaya pengurangan timbulan sampah dari sumbernya," katanya.

Salah satu inovasi penanganan sampah adalah dengan mengurangi timbulan mulai dari hulu. Sumber utama penghasil sampah harus ditekan sehingga sampah berkurang sejak dari hulu. Untuk merealisasikannya dapat dilakukan salah satunya dengan memberdayakan Kelompok Pengelola Sampah atau KPS. "DLH mendorong pembentukan KPS bank sampah dan TPS3R di setiap kalurahan, minimal [satu kalurahan] memiliki satu KPS," katanya.

Rumah tangga baik di pedesaan dan perkotaan harus dapat mengelola sampah dengan baik di tingkat kalurahan, sehingga penanganan tidak perlu sampai ke luar wilayah. Bank sampah maupun TPS3R diharapkan dapat memutus rantai pengelolaan sampah sehingga pengelolaan selesai di tingkat kalurahan.

Pembentukan bank sampah atau TPS3R di tiap kalurahan juga harus disesuaikan. "KPS harus memiliki kelembagaan, pengurus, serta sumber daya manusia yang mampu dan mengetahui terkait dengan pengelolaan sampah, memiliki sarana dan prasarana penunjang dan memiliki sistem operasional," katanya.

Ia berharap dengan pengelolaan dari sumbernya, timbulan sampah berkurang sejak dari rumah tangga. Upaya ini akan terus dilakukan di seluruh kalurahan dengan menggandeng praktisi persampahan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM), akademisi dan *stakeholder* lainnya untuk bersama-sama mendampingi masyarakat. "Saat ini sudah ada SK Bupati Kulonprogo No.185/A/2025 tentang Syarat Pembentukan KPS," ucapnya.

(Khairul Ma'arif)